



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD THAMRIN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 629809

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.380.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/129 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/45 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 12.369 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **210.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA V LUXURY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **38.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **244.998.227**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.872.998.227**

III. HUTANG **Rp.** **268.899.354**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.604.098.873**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UDI HERDADI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 157799

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	480.000.000
1. Tanah Seluas 459 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI		
Rp. 60.000.000		
2. Tanah Seluas 211 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI		
Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 2.028 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI		
Rp. 270.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	91.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI		
Rp. 85.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL		
SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL		
SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	99.242.856
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	722.242.856
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	722.242.856

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDI SARIFUDIN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 629829

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 812.040.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/130 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA , Rp. 812.040.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI ATLIT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FREE GO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.876.590

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 947.916.590

III. HUTANG Rp. 90.981.547

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 856.935.043

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN****UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SEPTY BAHARINI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMA**
3. NHK : **134976**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **170.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **71.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **9.250.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **384.822.688****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **635.072.688****III. HUTANG** **Rp.** **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **635.072.688****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRLY ERWINDAWATY
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 625316

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	140.000.000
1. MOBIL, ZUZUKI MINIBUS Tahun 2020, HIBAH TANPA AKTA Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	858.256.597
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.041.006.597

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.041.006.597

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.